


LOGIKA PASAR SEBAGAI LENSEA MEMBACA REALITAS SOSIAL DALAM ERA NEOLIBERALISME



KELAS GAGASAN PROGRESIF
BEM FKM UNHAS
2025-2026

**TEKNOLOGI PERTANIAN?
KEBERLANJUTAN EKOLOGI ATAU
PERPANJANGAN TANGAN KAPITALISME?**

02

**PENDIDIKAN SEBAGAI KOMODITAS: MEMBACA
REALITAS SOSIAL MELALUI LOGIKA PASAR
NEOLIBERAL**

04

**TRAKTOR PINTAR DAN PETANI TERSISIH:
TEKNOLOGI PERTANIAN DALAM BAYANG
LOGIKA NEOLIBERAL**

08

**SAAT DUNIA DIKUASAI PASAR: REALITAS
SOSIAL DALAM ERA NEOLIBERAL**

12

**SIMFONI SUNYI DI TENGAH BISING PASAR:
SAAT KEMANUSIAAN MENJADI GEMA YANG
HAMPIR TAK TERDENGAR**

18

**LOGIKA PASAR DAN HEGEMONI
NEOLIBERALISME: TRANSFORMASI PENDIDIKAN
DALAM ERA KAPITALISME LANJUT**

07

**KESEHATAN DI BAWAH BAYANG PASAR:
MENELUSURI RASIONALITAS NEOLIBERAL DALAM
KEHIDUPAN MODERN**

21

**DARI KAPITALISME KE
NEOLIBERALISME: KETIKA PASAR
MENGATUR ASPEK KEHIDUPAN**

24

**PASAR SEBAGAI HUKUM TERTINGGI?
TEGAH KRITIS ATAS PERAN HUKUM
DALAM KAPITALISME NEOLIBERAL**

30

TEKNOLOGI PERTANIAN? KEBERLANJUTAN EKOLOGI ATAU PERPANJANGAN TANGAN KAPITALISME?

YUSUF TAUFIQURRAHMAN (FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN)

Kita hidup dalam zaman ketika kata "keberlanjutan" menjadi mantra baru pembangunan. Di atas panggung konferensi, di lembar kebijakan dan di brosur perusahaan agritech, teknologi pertanian disebut-sebut sebagai solusi menuju masa depan yang hijau, efisien dan berkelanjutan. Tapi apakah teknologi pertanian hari ini benar-benar menyelamatkan ekologi?, ataukah justru memperpanjang tangan kapitalisme dengan wajah baru yang lebih halus?

Kapitalisme, sebagaimana dijelaskan Marx, ia tak hanya sistem ekonomi, melainkan modus produksi kehidupan. Ia bertumpu pada akumulasi modal, kepemilikan privat, dan komodifikasi segala hal, termasuk tanah, air, udara dan bahkan benih. Dalam logika pasar kapitalistik, alam bukan lagi tubuh kehidupan, melainkan faktor produksi. Petani bukan lagi subjek kultural yang berelasi dengan tanah, tetapi menjadi operator ekonomi dalam rantai nilai global. Produksi pangan tidak didorong oleh kebutuhan hidup, tetapi oleh dorongan untuk menghasilkan nilai lebih (surplus value) bagi pemilik modal. Maka, sejak awal relasi antara pertanian dan kapitalisme sudah timpang yang disebut pembangunan pertanian sering kali berarti komersialisasi sumber daya dan tenaga rakyat atas nama efisiensi.

Ketika kapitalisme mengalami krisis di paruh kedua abad ke-20, muncullah neoliberalisme wajah baru kapitalisme yang lebih ideologis. Hayek dan Friedman menyebut kebebasan sejati hanya dapat lahir dari pasar bebas. Negara bukan lagi pelindung rakyat, melainkan fasilitator pasar. Di sektor pertanian, neoliberalisme hadir melalui dua kata kunci: modernisasi dan inovasi. Teknologi dijual sebagai penyelamat. Tapi seperti diingatkan David Harvey, neoliberalisme adalah proyek politik untuk mengembalikan kekuasaan kelas kapitalis melalui logika pasar yang meresap ke seluruh kehidupan sosial.

Dalam dunia ini, bahkan “solusi” terhadap krisis ekologis dijadikan komoditas baru. Benih hibrida, pupuk kimia, mesin pintar dan aplikasi pertanian digital semua tampak netral, bahkan progresif. Namun di balik narasi efisiensi itu, tersimpan logika fetisisme teknologi: kita memuja alat tanpa menyadari siapa yang mengendalikan alat itu dan untuk kepentingan siapa ia bekerja. Foucault menyebutnya *governmentality* neoliberal: cara baru mengatur manusia bukan lewat larangan, tetapi lewat kebebasan yang diarahkan. Petani dipanggil menjadi “wirausaha pertanian mandiri”, padahal mereka kini terikat dalam ekosistem pasar yang sepenuhnya dikendalikan korporasi dari benih hingga data panen.

Teknologi pertanian modern menjanjikan efisiensi dan keberlanjutan. Namun, seperti diingatkan Karl Polanyi, pasar yang “mengatur diri sendiri” selalu melahirkan disembedding pemisahan ekonomi dari etika sosial dan ekologi. Hasilnya: tanah yang dulu subur kini kelelahan oleh input kimia, air yang dulu jernih kini sarat limbah pupuk dan pestisida, dan biodiversitas yang dulu kaya kini digantikan oleh monokultur yang rapuh.

Kita menyebutnya *smart farming*, tapi bumi menjadi semakin bodoh: kehilangan kemampuan alamnya untuk memulihkan diri. Vandana Shiva mengingatkan bahwa teknologi pertanian yang digerakkan pasar global adalah bentuk baru kolonialisme kali ini bukan menaklukkan wilayah, tetapi menaklukkan benih dan pengetahuan lokal. Benih dipatenkan, tanah disertifikatkan, dan pengetahuan rakyat dihapus dari narasi resmi sains. Inilah paradoks terbesar teknologi pertanian modern: Ia berbicara tentang keberlanjutan, tapi beroperasi dengan logika yang justru meniadakan keberlanjutan itu sendiri.

Neoliberalisme tidak hanya mengubah ekosistem alam, tapi juga ekosistem sosial. Petani yang dulu bergantung pada komunitas dan solidaritas kini dipaksa bersaing di pasar global. Mereka menjadi “manajer risiko” dari bisnis pertanian pribadi, tanpa perlindungan struktural. Negara, yang seharusnya menjadi pelindung, berperan sebagai penghancur: menghubungkan petani dengan pasar, bukan menjamin hak hidup mereka. Subsidi dianggap “distorsi”. Bantuan dianggap “intervensi”.

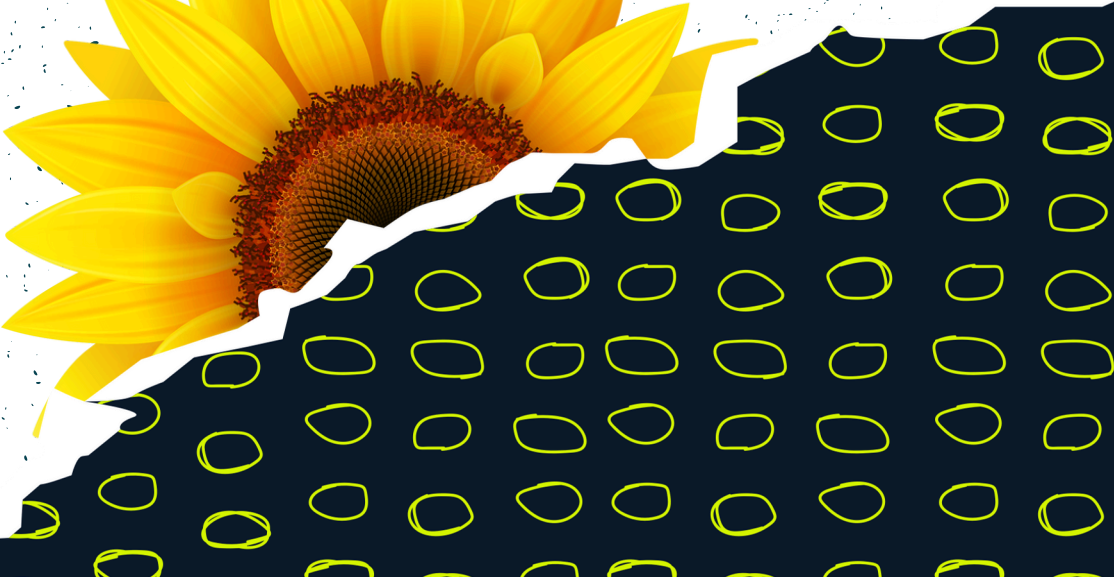
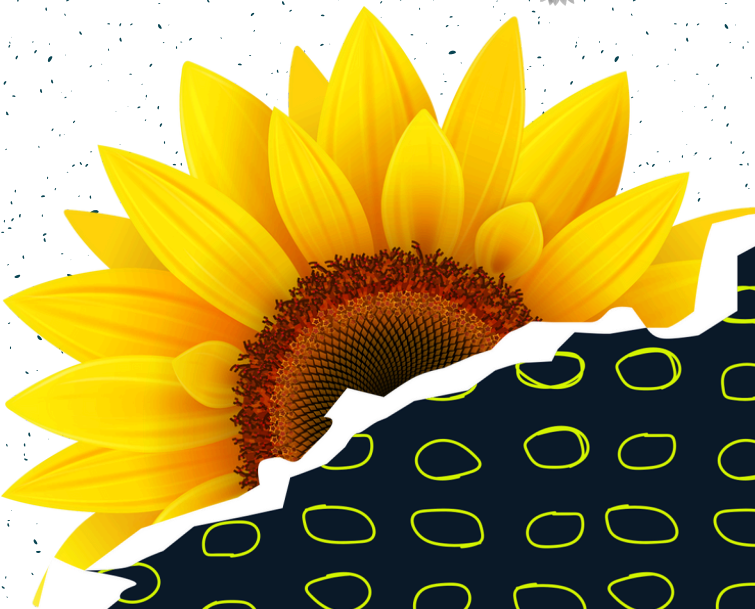
Petani didorong untuk mandiri, tetapi dibiarkan sendirian menghadapi fluktuasi harga dan cuaca ekstrem. pasar tidak hanya memproduksi barang, tapi juga cara berpikir. Logika pasar mengubah kesadaran sosial: petani tidak lagi menanam untuk hidup, tetapi hidup untuk menanam demi pasar.



Logika pasar berbahaya karena ia menjadi satu-satunya cara pandang yang diizinkan. Ketika kita membiarkan pasar menentukan apa yang bernilai, kita kehilangan kemampuan untuk menilai hal-hal yang tidak seharusnya dikurangi menjadi harga: tanah yang subur, komunitas yang berkelanjutan, pengetahuan yang diwariskan dan martabat manusia. Melawan kolonisasi logika ini bukan hanya soal menentang kebijakan neoliberal, tetapi soal membangun epistemologi alternative menciptakan ruang di mana nilai ekologis, sosial dan kultural kembali menjadi bagian dari kalkulus kebijakan. Apabila hari ini kita menanggalkan lensa pasar, apa yang akan kita lihat berbeda besok di ladang, di pasar dan di ruang-ruang kebijakan?

Teknologi pertanian bukanlah musuh. Ia adalah cermin dari nilai-nilai yang menuntunnya. Jika ia diarahkan oleh logika kehidupan, ia bisa menjadi alat keberlanjutan. Tapi jika ia dikendalikan oleh logika pasar neoliberal ia akan menjadi mesin yang memakan bumi, dan pada akhirnya, memakan manusia itu sendiri. Maka pertanyaan kita bukan "apakah kita butuh teknologi?", tetapi teknologi siapa, untuk siapa, dan untuk apa.


Kita tidak menolak kemajuan, tapi menolak penyeragaman nilai yang menempatkan efisiensi di atas keberlanjutan, keuntungan diatas kehidupan. Karena masa depan pertanian bukan ditentukan oleh mesin yang lebih pintar, tetapi oleh manusia yang lebih bijak. Manusia yang berani menempatkan alam, bukan pasar sebagai pusat peradaban.



“PENDIDIKAN SEBAGAI KOMODITAS: MEMBACA REALITAS SOSIAL MELALUI LOGIKA PASAR MEOLIBERAL”

WENDY BERLINA (FKM)

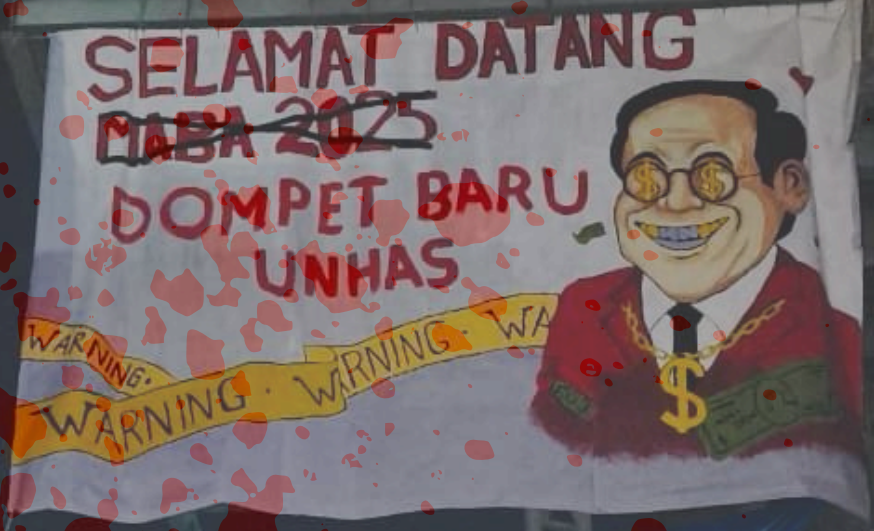




Hari ini, sadar tidak sadar, kita sedang menghadapi penggiringan wacana kapitalisme yang "gilanya" telah berada di sudut-sudut kampus. Logika mekanisme pasar sebagai mode pembangunan peradaban telah menjadi tamu di kampus-kampus. Melalui regulasi yang bersentuhan langsung dengan pendidikan, kapitalisme mencoba menciptakan aturan yang mendorong Negara membukakan pintu kepada borjuasi untuk berpartisipasi aktif dalam penciptaan tenaga kerja, murah, dan setia pada ketundukan, bersama Negara mereka akan mengarahkan pendidikan sebagai pemenuhan kebutuhan industri yang kapitalistik. Untuk membaca hal ini, sebelumnya kita mesti membuka kamus pendidikan dalam menyamakan frekuensi perihal pendidikan dan fungsinya. Pendidikan adalah sebuah proses bagaimana pengetahuan dan nilai ditransformasi. Alat yang vital dalam menciptakan dan mempertahankan sebuah peradaban. Bagaimana kita dididik akan mempengaruhi paradigma atau pandangan kita terhadap dunia. Dididik untuk menjadi seorang yang merdeka atau hanya akan berujung pada ilusi merdeka kapitalisme yang memabukkan.

Pendidikan sejatinya berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

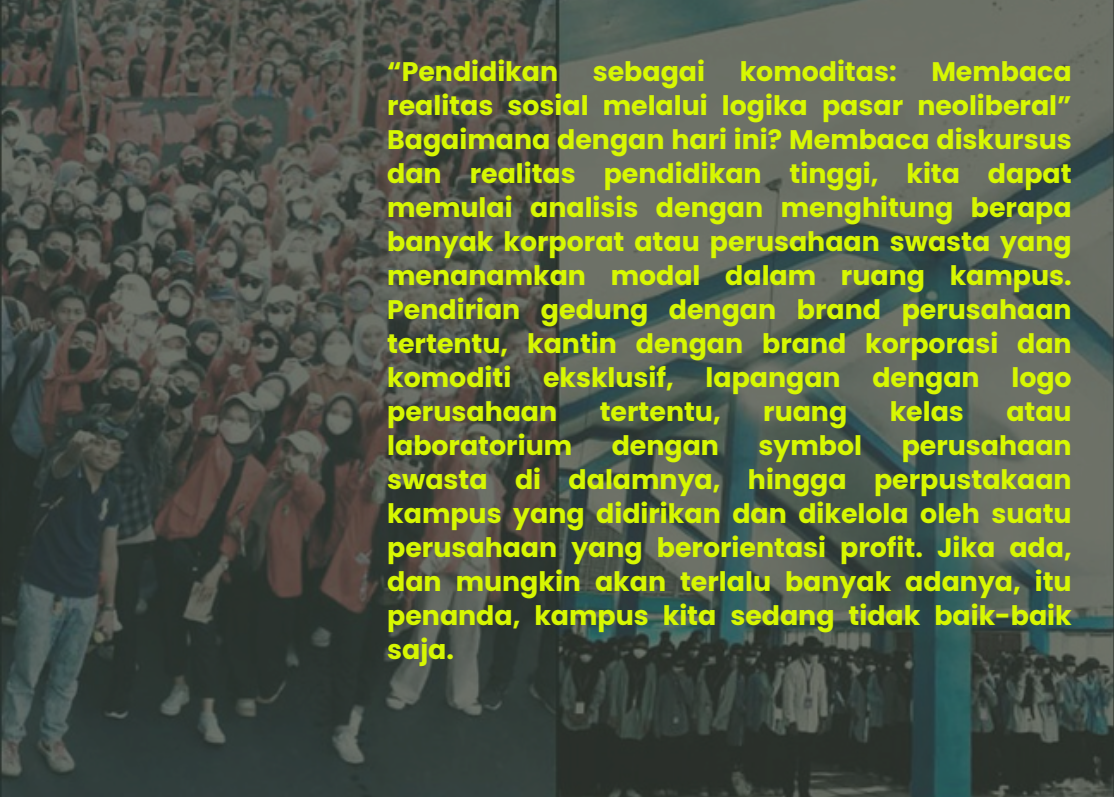
Kapitalisme merupakan sistem ekonomi-politik yang berlandaskan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi serta berorientasi terhadap akumulasi keuntungan. Dalam sistem kapitalisme, hubungan sosial manusia dimediasi oleh komoditas segala sesuatu yang memiliki nilai tukar di pasar sehingga hubungan antarindividu diubah menjadi hubungan ekonomi yang diatur oleh logika pertukaran nilai. Karl Marx menegaskan bahwa kapitalisme bukan sekadar sistem produksi, melainkan suatu tatanan sosial yang menempatkan akumulasi modal sebagai tujuan utama kegiatan ekonomi. Produksi dalam kapitalisme tidak lagi didorong oleh kebutuhan manusia, tetapi oleh dorongan untuk menciptakan nilai lebih (surplus value) bagi pemilik modal.



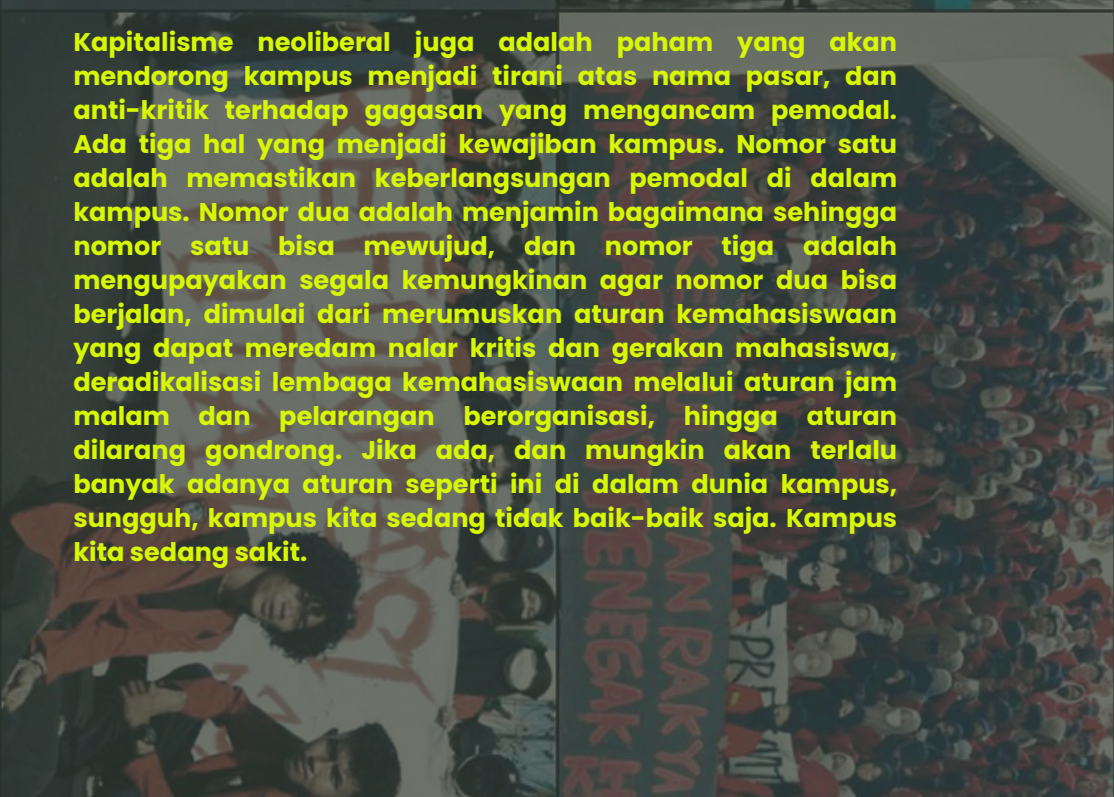
Dalam hal ini **noliberalisme atau pasar bebas** muncul sebagai respon terhadap krisis yang menimpa kapitalisme, ketika pertumbuhan ekonomi melambat dan negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap tidak efisien. Tokoh-tokoh seperti Friedrich Hayek dan Friedman mempromosikan gagasan bahwa kebebasan sejati hanya dapat dijamin melalui pasar bebas yang minim intervensi negara. Dalam kerangka ini, negara berfungsi bukan untuk melindungi kesejahteraan sosial, tetapi untuk menjamin berjalannya mekanisme pasar secara efisien.

Menurut David Harvey (2005), neoliberalisme adalah proyek politik untuk mengembalikan kekuasaan kelas kapitalis dengan menjadikan pasar sebagai prinsip pengatur utama seluruh kehidupan sosial. Prinsip-prinsipnya meliputi deregulasi, privatisasi, liberalisasi perdagangan, dan pengurangan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat. Rasionalitas neoliberal tidak berhenti pada bidang ekonomi semata, melainkan merembes ke ranah sosial, pendidikan, budaya, bahkan politik, sehingga seluruh kehidupan tunduk pada ukuran efisiensi, daya saing, dan profitabilitas.

Pendidikan sejatinya dijalankan dengan mode pendidikan kritis, pendidikan yang mengedepankan pembangunan manusianya menuju masyarakat yang maju. Maju dalam berpengetahuan, maju dalam teknologi, dan yang paling penting maju dalam berkemanusiaan, memandang yang lain sebagai bagian dari diri, bukan sebagai konsumen. Sementara itu, logika kapitalisme neoliberal dalam dunia pendidikan perlahan tapi pasti akan menggeser esensi berpendidikan itu sendiri. Kampus dipandang sebagai pabrik yang akan mencetak tenaga kerja terampil, murah, dan setia pada ketertundukan. Ruang dalam kampus dijadikan lahan investasi dengan mahasiswa sebagai konsumen yang pasti.



"Pendidikan sebagai komoditas: Membaca realitas sosial melalui logika pasar neoliberal" Bagaimana dengan hari ini? Membaca diskursus dan realitas pendidikan tinggi, kita dapat memulai analisis dengan menghitung berapa banyak korporat atau perusahaan swasta yang menanamkan modal dalam ruang kampus. Pendirian gedung dengan brand perusahaan tertentu, kantin dengan brand korporasi dan komoditi eksklusif, lapangan dengan logo perusahaan tertentu, ruang kelas atau laboratorium dengan symbol perusahaan swasta di dalamnya, hingga perpustakaan kampus yang didirikan dan dikelola oleh suatu perusahaan yang berorientasi profit. Jika ada, dan mungkin akan terlalu banyak adanya, itu penanda, kampus kita sedang tidak baik-baik saja.



Kapitalisme neoliberal juga adalah paham yang akan mendorong kampus menjadi tirani atas nama pasar, dan anti-kritik terhadap gagasan yang mengancam pemodal. Ada tiga hal yang menjadi kewajiban kampus. Nomor satu adalah memastikan keberlangsungan pemodal di dalam kampus. Nomor dua adalah menjamin bagaimana sehingga nomor satu bisa mewujudkan, dan nomor tiga adalah mengupayakan segala kemungkinan agar nomor dua bisa berjalan, dimulai dari merumuskan aturan kemahasiswaan yang dapat meredam nalar kritis dan gerakan mahasiswa, deradikalisasi lembaga kemahasiswaan melalui aturan jam malam dan pelarangan berorganisasi, hingga aturan dilarang gondrong. Jika ada, dan mungkin akan terlalu banyak adanya aturan seperti ini di dalam dunia kampus, sungguh, kampus kita sedang tidak baik-baik saja. Kampus kita sedang sakit.

TRAKTOR PINTAR DAN PETANI TERSISIH: TEKNOLOGI PERTANIAN DALAM BAYANG LOGIKA NEOLIBERAL

BRENDA EVEILIN (FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN)

Revolusi industri ke-empat melahirkan era baru dalam pertanian: traktor pintar, sistem irigasi otomatis, dan sensor digital menjanjikan efisiensi tinggi dalam produksi pangan. Namun di balik narasi kemajuan itu, tersembunyi logika pasar yang kian menundukkan petani kecil pada sistem ekonomi global yang kompetitif dan eksploitatif. Pertanian kini bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga ajang akumulasi modal dan kompetisi teknologi.

Untuk memahami realitas ini, perlu ditelusuri bagaimana prinsip kapitalisme dan ideologi neoliberalisme bekerja dalam membentuk arah perkembangan teknologi pertanian. Logika pasar tidak hanya mengatur distribusi barang dan modal, tetapi juga membentuk cara manusia berpikir, bekerja, dan hidup. Tulisan ini akan membedah empat aspek utama: prinsip dasar kapitalisme, teori dan konsep neoliberalisme, hubungan keduanya, serta dampak logika pasar terhadap sektor Teknologi Industri Pertanian

Kapitalisme sebagai Mesin Nilai Tukar:

KETIKA PRODUKSI MENJADI IDEOLOGI

Kapitalisme lahir dari keyakinan bahwa kemakmuran hanya dapat dicapai melalui kebebasan pasar dan kepemilikan pribadi atas alat produksi. Di bawah logika ini, setiap barang termasuk pangan dan lahan dinilai bukan berdasarkan kegunaannya (use value), melainkan berdasarkan nilai jualnya di pasar (exchange value). Karl Marx (1867) mengungkapkan bahwa sistem kapitalis bergantung pada eksploitasi tenaga kerja untuk menciptakan surplus value, yaitu nilai lebih yang diambil oleh pemilik modal.

Dalam konteks pertanian, ini berarti hasil kerja petani dievaluasi dari seberapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan bukan dari kesejahteraan mereka atau keberlanjutan lingkungan. Logika kapitalisme menjadikan efisiensi dan produktivitas sebagai ukuran tunggal keberhasilan.

Akibatnya, teknologi pertanian dikembangkan bukan untuk membebaskan petani dari ketertinggalan, tetapi untuk mempercepat akumulasi keuntungan.

Dengan demikian, kapitalisme bukan hanya sistem ekonomi tetapi ideologi produksi yang menuntut manusia tunduk pada nilai tukar



Neoliberalisme adalah anak kandung kapitalisme yang lahir dari keyakinan bahwa pasar bebas merupakan satu-satunya mekanisme rasional dalam mengatur kehidupan. Friedrich Hayek dan Milton Friedman berpendapat bahwa intervensi negara harus diminimalkan agar kreativitas dan kompetisi ekonomi berkembang secara alami. David Harvey (2005) menjelaskan neoliberalisme sebagai teori yang menekankan "pembebasan kekuatan pasar" dari belenggu regulasi dan kolektivitas. **Namun kebebasan yang dijanjikan ini justru melahirkan bentuk baru dari ketergantungan individu didorong menjadi entrepreneur of the self, yang harus mengelola hidupnya layaknya perusahaan.** Dalam dunia pertanian, neoliberalisme tampak dalam narasi modern farming dan agropreneurship, yang mendorong petani untuk bersaing dalam pasar global tanpa dukungan struktural. **Petani yang gagal beradaptasi dianggap tidak inovatif, padahal mereka tersisih oleh struktur ekonomi yang memihak pemilik modal dan teknologi.** Neoliberalisme dengan demikian, tidak hanya mengatur ekonomi, tetapi juga menciptakan bentuk rasionalitas baru: manusia harus selalu efisien, kompetitif, dan berorientasi laba bahkan dalam urusan pangan dan alam.



Simbiosis Kapitalisme dan Neoliberalisme

PASAR SEBAGAI AGAMA BARU TEKNOLOGI

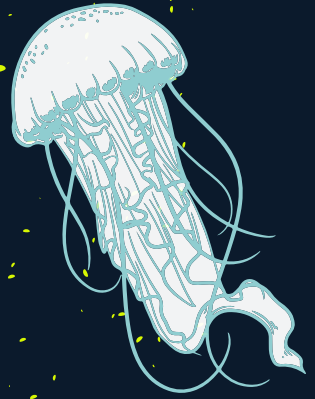
Kapitalisme dan neoliberalisme memiliki hubungan simbiotik: kapitalisme menyediakan sistem produksinya sedangkan neoliberalisme menyempurnakannya melalui rasionalitas dan ideologi kebebasan pasar. Jika kapitalisme klasik menekankan eksploitasi tenaga kerja, maka neoliberalisme memodernkannya menjadi eksploitasi data, inovasi, dan kebebasan semu. Michel Foucault (1979) menggambarkan neoliberalisme sebagai bentuk governmentality, cara baru mengatur manusia bukan melalui kekuasaan langsung melainkan melalui pembentukan kesadaran dan perilaku ekonomi. Individu diprogram untuk mematuhi logika pasar tanpa merasa dipaksa. Dalam Teknologi Industri Pertanian, hal ini tampak jelas: setiap inovasi mulai dari sensor kelembapan tanah hingga sistem pemantauan satelit diklaim sebagai solusi ilmiah padahal ia bekerja dalam kerangka pasar yang mencari profit. Teknologi tidak lagi netral tetapi menjadi instrumen kapitalisme untuk memperluas jangkauan pasar ke ranah biologis dan ekologis. Dengan kata lain, kapitalisme menyediakan mesin, sementara neoliberalisme menanamkan logika yang membuat mesin itu diterima sebagai keniscayaan moral dan sosial.

SAAT DUNIA DIKUASAI PASAR: REALITAS SOSIAL DALAM ERA NEOLIBERAL


NURINI ANDRADDIPUJI AFDAL (FKM)

Dalam era modern, kehidupan manusia tidak lagi bisa dilepaskan dari pengaruh pasar. Aktivitas sosial, budaya, bahkan moralitas kini dikonstruksi berdasarkan nilai-nilai ekonomi. Fenomena ini dikenal sebagai dominasi logika pasar di mana segala aspek kehidupan dinilai dari segi efisiensi, keuntungan, dan nilai tukar. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan ekonomi liberal, logika pasar menjadi cara pandang utama dalam membaca realitas sosial. Pandangan ini lahir dari akar ideologi kapitalisme dan berkembang secara ekstrem melalui neoliberalisme. Untuk memahami bagaimana realitas sosial saat ini terbentuk, penting menelusuri prinsip dasar kapitalisme, teori neoliberalisme, hubungan antara keduanya, serta dampaknya dalam sektor kesehatan sebagai contoh nyata.

Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang menempatkan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan kebebasan pasar sebagai fondasi utamanya. Dalam pandangan Adam Smith (1776) melalui karyanya *The Wealth of Nations*, pasar bebas yang diatur oleh "tangan tak terlihat" akan menciptakan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Setiap individu bertindak rasional untuk mencari keuntungan pribadi, dan dari perilaku inilah tercipta efisiensi ekonomi secara keseluruhan. Prinsip dasar kapitalisme mencakup hak milik pribadi, kebebasan berkompetisi, dan akumulasi modal. Keuntungan dilihat sebagai indikator keberhasilan dan menjadi pendorong utama produktivitas serta inovasi.




Namun, sistem ini juga membawa konsekuensi sosial. Dalam praktiknya, kapitalisme menciptakan ketimpangan ekonomi yang tajam antara pemilik modal dan kelas pekerja. Karl Marx menilai bahwa kapitalisme melahirkan eksploitasi karena nilai lebih yang dihasilkan oleh buruh diambil oleh pemilik modal untuk memperbesar keuntungan. Akibatnya, terjadi alienasi, di mana pekerja kehilangan makna kemanusiaannya karena terjebak dalam logika produksi dan konsumsi. Dengan demikian, meskipun kapitalisme melahirkan kemajuan teknologi dan efisiensi ekonomi, ia juga menanamkan nilai-nilai individualisme dan kompetisi ekstrem dalam kehidupan sosial.




Neoliberalisme muncul pada akhir abad ke-20 sebagai bentuk pembaruan dari kapitalisme klasik, terutama setelah krisis ekonomi dunia tahun 1970-an. Teori ini menegaskan bahwa pasar bebas merupakan mekanisme paling efisien untuk mengatur seluruh aspek kehidupan, bukan hanya ekonomi. Menurut David Harvey (2005), neoliberalisme adalah proyek politik dan ekonomi yang bertujuan mengembalikan kekuasaan kelas kapitalis melalui deregulasi, privatisasi, liberalisasi perdagangan, dan pembatasan intervensi negara. Negara hanya berfungsi sebagai penjaga agar pasar tetap beroperasi bebas tanpa hambatan.

Neoliberalisme memperluas ruang lingkup kapitalisme ke ranah sosial dan budaya. Dalam masyarakat neoliberal, efisiensi ekonomi dijadikan tolok ukur keberhasilan semua lembaga, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bahkan kebijakan publik. Nilai-nilai seperti kompetisi, efisiensi, dan kemandirian individu menjadi moralitas baru yang menggantikan solidaritas sosial. Wendy Brown (2015) menyebut neoliberalisme sebagai "revolusi diam-diam" yang mengubah manusia menjadi homo economicus-individu yang melihat diri dan orang lain semata-mata sebagai entitas ekonomi. Dampaknya, kebijakan publik lebih menekankan keuntungan dan efisiensi ketimbang kesejahteraan kolektif.



Kapitalisme dan neoliberalisme memiliki hubungan yang erat. Kapitalisme menyediakan fondasi ideologis berupa kebebasan pasar dan kepemilikan pribadi, sedangkan neoliberalisme memperluas prinsip-prinsip tersebut menjadi norma universal yang mengatur kehidupan sosial dan politik. Jika kapitalisme klasik masih mengakui peran negara dalam melindungi warganya, neoliberalisme justru menuntut pengurangan peran negara dan memberikan dominasi penuh pada mekanisme pasar. Dengan kata lain, neoliberalisme adalah bentuk "radikalisasi kapitalisme" yang tidak hanya mengatur produksi dan konsumsi, tetapi juga membentuk kesadaran sosial manusia.


Hubungan ini tampak jelas dalam konteks globalisasi ekonomi. Lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF mendorong negara-negara berkembang untuk mengadopsi kebijakan pasar bebas sebagai syarat bantuan finansial. Proses ini disebut structural adjustment, di mana negara harus memangkas subsidi sosial, melakukan privatisasi, dan membuka diri terhadap investasi asing. Akibatnya, negara kehilangan kedaulatan ekonomi dan masyarakat dipaksa menyesuaikan diri dengan logika pasar global. Dalam tatanan seperti ini, nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial seringkali dikorbankan demi kepentingan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.



Salah satu sektor yang paling terdampak oleh logika pasar neoliberal adalah sektor kesehatan. Dalam sistem neoliberal, kesehatan tidak lagi dipandang sebagai hak dasar manusia melainkan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Rumah sakit, layanan kesehatan, dan obat-obatan dikelola seperti perusahaan bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Vicente Navarro (2019) menyatakan bahwa neoliberalisme telah mendorong negara untuk menarik diri dari tanggung jawab pelayanan publik, menyerahkan layanan kesehatan kepada mekanisme pasar melalui privatisasi dan asuransi swasta.

Akibatnya, terjadi komersialisasi kesehatan di mana akses terhadap layanan berkualitas hanya dimiliki oleh mereka yang mampu membayar. Masyarakat miskin terpinggirkan karena tidak mampu mengikuti logika biaya yang ditetapkan pasar. Dalam konteks global, perusahaan farmasi multinasional mendominasi riset dan distribusi obat, sehingga kesehatan masyarakat menjadi ladang keuntungan korporasi. Pandemi COVID-19 memberikan contoh nyata: distribusi vaksin tidak merata karena dikendalikan oleh negara kaya dan perusahaan besar yang berorientasi pada keuntungan.

Di sisi lain, orientasi pasar dalam sistem kesehatan juga mengubah hubungan antara tenaga medis dan pasien. Pelayanan kesehatan tidak lagi berpusat pada kemanusiaan dan empati, melainkan pada efisiensi waktu, target profit, dan kepuasan pelanggan. Konsep pasien sebagai konsumen menciptakan hubungan transaksional yang menyingkirkan nilai solidaritas sosial. Dengan demikian, logika pasar yang diusung kapitalisme-neoliberalisme telah menembus sendi-sendi kemanusiaan dan mengubah esensi pelayanan publik menjadi ajang komersialisasi.



Melihat realitas sosial melalui logika pasar dalam era neoliberal berarti menyadari bahwa hampir semua aspek kehidupan kini tunduk pada nilai-nilai ekonomi. Kapitalisme menyediakan dasar ideologinya, sementara neoliberalisme memperluas pengaruhnya hingga ke ranah sosial, budaya, dan politik. Akibatnya, masyarakat modern semakin kehilangan orientasi sosial dan moralitas kolektif, tergantikan oleh rasionalitas ekonomi dan kompetisi individu.



Dalam konteks sektor kesehatan, dampak neoliberalisme sangat jelas terlihat melalui privatisasi layanan dan komersialisasi hak dasar manusia. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan akademisi untuk mengkritisi dominasi logika pasar agar nilai kemanusiaan tidak sepenuhnya ditelan oleh kepentingan ekonomi. Hanya dengan kesadaran kritis inilah manusia dapat menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial dalam kehidupan global yang kian neoliberal.



SIMFONI SUNYI DI TENGAH BISING PASAR:

SAAT KEMANUSIAAN MENJADI GEMA YANG HAMPIR TAK TERDENGAR

Dewi Angreani (FKM)

Di tengah gemuruh kota yang tak pernah tidur, di antara cahaya reklame yang lebih terang dari nurani manusia, dunia kini hidup dalam irama tunggal: irama pasar. Segala sesuatu diukur dengan harga, ditimbang dengan untung dan rugi, dan ditentukan oleh siapa yang paling cepat mengambil peluang. Dalam dunia seperti ini, manusia kehilangan harmoni; kemanusiaan yang dahulu menjadi pusat kehidupan kini hanya menjadi gema samar yang nyaris tak terdengar di antara bisingnya mesin ekonomi global. Inilah potret dunia yang dibentuk oleh logika pasar dunia yang lahir dari rahim kapitalisme dan tumbuh dewasa dalam pelukan neoliberalisme.

Kapitalisme berdiri di atas keyakinan bahwa kebebasan individu adalah kunci kemajuan. Ia memberi ruang bagi manusia untuk memiliki, berkompetisi, dan memperkaya diri melalui mekanisme pasar. Prinsip dasarnya sederhana: siapa yang bekerja paling keras, dialah yang paling berhak atas hasilnya. Namun di balik narasi indah tentang kebebasan dan kemajuan itu, kapitalisme menyembunyikan paradoks: kebebasan hanya milik mereka yang memiliki modal. Mereka yang kaya dapat menentukan arah pasar, sementara mereka yang miskin hanya menjadi bagian dari roda produksi yang terus berputar tanpa daya. Relasi antarmanusia pun kehilangan makna kemanusiaan, tergantikan oleh relasi transaksional di mana nilai manusia diukur dari seberapa besar ia dapat menghasilkan keuntungan. Kapitalisme, dengan dalih rasionalitas ekonomi, telah mengubah manusia menjadi angka, dan kehidupan menjadi grafik laba-rugi.



Namun kapitalisme bukanlah sistem yang diam. Ia terus bertransformasi untuk bertahan dari krisis yang diciptakannya sendiri. Pada dekade 1970-an, saat dunia mengalami gejolak ekonomi, lahirlah wajah baru yang lebih halus namun lebih dalam cengkeramannya: neoliberalisme. Ideologi ini memuja pasar sebagai satu-satunya mekanisme yang sah untuk mengatur kehidupan. Tokoh-tokohnya seperti Friedrich Hayek dan Milton Friedman meyakini bahwa campur tangan negara adalah penghalang bagi kebebasan ekonomi. Negara, bagi mereka, sebaiknya hanya menjadi penjaga pagar yang memastikan tidak ada gangguan terhadap kompetisi bebas. Maka muncullah kebijakan-kebijakan seperti privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi ekonomi semuanya dilakukan atas nama efisiensi dan pertumbuhan.



Neoliberalisme tidak berhenti pada tataran ekonomi. Ia menjelma menjadi cara berpikir dan cara hidup. Manusia didorong untuk menjadi “wirausahawan atas dirinya sendiri”, memandang segala hal sebagai investasi yang harus menghasilkan keuntungan. Nilai-nilai sosial bergeser menjadi nilai pasar: persahabatan menjadi jaringan, pendidikan menjadi modal, dan tubuh menjadi aset. Bahkan kebahagiaan pun dijual sebagai produk. Dalam logika ini, kegagalan dianggap sebagai kesalahan pribadi, bukan akibat dari sistem yang timpang. Maka lahirlah generasi yang kompetitif namun rapuh, bebas namun terikat oleh tekanan untuk selalu “berhasil” di mata pasar.



Hubungan antara kapitalisme dan neoliberalisme begitu erat, ibarat dua sisi dari satu koin yang sama. Kapitalisme menyediakan fondasi materialnya, sementara neoliberalisme menjadi ideologi yang menjaga agar sistem itu tetap dianggap “wajar”. Jika kapitalisme adalah mesin, maka neoliberalisme adalah bahan bakarnya keduanya bekerja dalam harmoni untuk menundukkan kehidupan manusia pada logika keuntungan. Dalam kerangka ini, tidak hanya barang yang diperdagangkan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, bahkan moralitas. Segala sesuatu direduksi menjadi komoditas yang memiliki nilai tukar. Negara pun perlahan berubah menjadi perusahaan, dan warganya menjadi pelanggan yang harus membayar untuk setiap bentuk pelayanan publik.

Dampak dari logika kapitalisme-neoliberalisme ini terasa di berbagai sektor kehidupan. Di dunia pendidikan misalnya, kampus yang seharusnya menjadi ruang pencarian makna kini menjelma menjadi pabrik ijazah. Mahasiswa tidak lagi diajak berpikir kritis untuk mengubah dunia, melainkan dilatih agar sesuai dengan kebutuhan industri. Ilmu pengetahuan kehilangan idealismenya dan hanya berfungsi sebagai alat produksi tenaga kerja murah. Pendidikan menjadi mahal, bukan karena ilmu itu suci, tetapi karena pasar telah menentukan nilainya.




Dalam sektor kesehatan, rumah sakit yang dulu berdiri atas semangat kemanusiaan kini berubah menjadi korporasi besar. Pelayanan medis tidak lagi berorientasi pada penyembuhan, melainkan pada profit. Mereka yang mampu membayar mendapat perawatan terbaik, sementara yang miskin dibiarkan menunggu giliran di lorong-lorong sistem yang dingin. Hak atas kesehatan yang seharusnya universal kini menjadi hak istimewa bagi mereka yang beruntung secara ekonomi. Di dunia kerja, neoliberalisme melahirkan sistem yang fleksibel bagi pemilik modal, namun menindas bagi pekerja. Buruh dipekerjakan melalui kontrak pendek, tanpa jaminan, tanpa perlindungan, dan dengan upah yang ditekan atas nama efisiensi. Sementara itu, perusahaan menikmati laba berlipat dari tenaga yang terus diperas. Semua ini dilegitimasi oleh narasi bahwa kompetisi adalah jalan menuju kemajuan, padahal yang sesungguhnya terjadi adalah pengorbanan manusia demi kelangsungan mesin ekonomi.

Bahkan dalam budaya dan kehidupan sehari-hari, logika pasar kini menembus kesadaran kita yang paling dalam. Media sosial menjadikan perhatian manusia sebagai komoditas; tubuh dijadikan objek pemasaran; cinta dan identitas dijual dalam bentuk citra digital. Kita hidup di tengah bisingnya pasar yang menjual segalanya, bahkan suara hati. Dunia yang dulu penuh makna kini berubah menjadi etalase besar yang menampilkan kehidupan palsu atas nama kebebasan.

Namun di balik kebisingan itu, masih ada simfoni sunyi suara lirih kemanusiaan yang menolak hilang. Suara yang mengingatkan bahwa hidup bukan sekadar tentang laba, bahwa nilai manusia tidak bisa ditentukan oleh pasar. Simfoni ini mungkin tak sekeras deru modal, tapi ia tetap bergetar di hati mereka yang sadar bahwa dunia tanpa nurani hanyalah panggung kosong. Dan mungkin, tugas kita sebagai mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat yang berpikir, adalah menjaga agar suara itu tidak sepenuhnya padam. Karena di tengah bisingnya pasar yang memuja keuntungan, masih ada ruang bagi harapan, ruang bagi keberanian untuk mempertanyakan sistem yang menindas, dan ruang bagi manusia untuk kembali menjadi manusia. Mungkin suara itu kini hanya gema yang hampir tak terdengar, tetapi selama masih ada yang mendengarkannya, simfoni kemanusiaan itu akan terus hidup meski perlahan, meski sunyi.





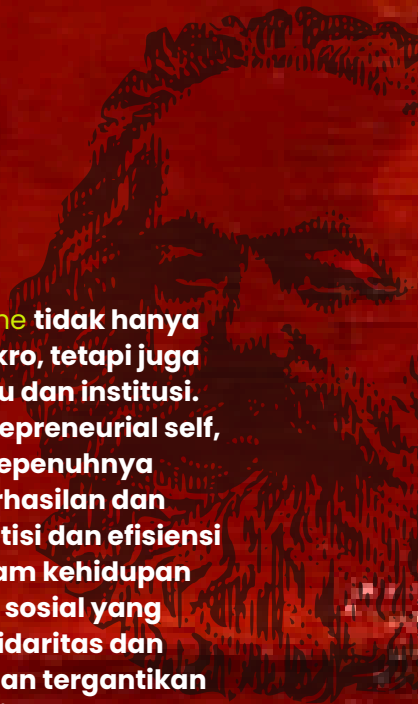
"LOGIKA PASAR DAN HEGEMONI NEOLIBERALISME: TRANSFORMASI PENDIDIKAN DALAM ERA KAPITALISME LANJUT"

AKHMAD ZHAKY MUKHTAR (FAPERTA)

Neoliberalisme merupakan fase lanjut dari kapitalisme yang menempatkan logika pasar sebagai prinsip utama dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, hingga pendidikan. **Berawal dari krisis ekonomi global 1978 dan runtuhnya sistem Bretton Woods, neoliberalisme berkembang melalui gagasan deregulasi, privatisasi, liberalisasi perdagangan, dan pengurangan peran negara, sebagaimana ditegaskan dalam Washington Consensus.**

Melalui lembaga keuangan Internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, **prinsip Neoliberalisme kemudian dipaksa masuk ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam konteks pendidikan, sektor pendidikan tinggi mulai dipandang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, terutama setelah adanya perjanjian GATS yang mewajibkan liberalisasi jasa pendidikan.**

Hal ini mendorong kampus untuk berorientasi pada pasar dan kebutuhan industri, mengarah pada **model PTN-BH serta peningkatan komersialisasi pendidikan, sehingga pendidikan tidak lagi dipandang sebagai hak sosial, melainkan sebagai investasi individu yang bergantung pada kemampuan ekonomi.**



Dalam kerangka ini, **Neoliberalisme** tidak hanya mengubah struktur ekonomi makro, tetapi juga membentuk cara berpikir individu dan institusi. Manusia dikonstruksi sebagai entrepreneurial self, yaitu subjek yang dianggap sepenuhnya bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalannya sendiri. Nilai kompetisi dan efisiensi menjadi standar moral baru dalam kehidupan masyarakat. Akibatnya, relasi sosial yang sebelumnya berlandaskan solidaritas dan kepentingan publik secara perlahan tergantikan oleh hubungan transaksional.

Pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat, tetapi sebagai ruang investasi yang menguntungkan bagi kapital. Dengan demikian, neoliberalisme tidak hanya bekerja melalui kebijakan ekonomi, tetapi juga melalui proses kultural dan ideologis yang menormalisasi logika pasar sebagai satu-satunya rasionalitas yang sah

**"KETIKA PENDIDIKAN TIDAK MEMBEBAHKAN, MIMPI
AKAN TETAP MENJADI MIMPI, BUKAN KENYATAAN."**

~PAULO FREIRE~





“

DALAM KONTEKS PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA, PENERAPAN LOGIKA PASAR TAMPAK MELALUI MUNCULNYA KEBIJAKAN PTN-BH YANG MEMBERI KELELUASAAN KAMPUS UNTUK Mencari sumber pendanaan secara mandiri. Hal ini mendorong kampus untuk melakukan komersialisasi layanan pendidikan, seperti kenaikan UKT, pembukaan kelas-kelas berbayar, kerja sama riset yang berorientasi industri, hingga orientasi lulusan yang dipersempit menjadi “siap kerja” sesuai kebutuhan pasar.”

qydiepie- Penyintas Pendidikan Mahal



PERGURUAN TINGGI kemudian berubah menjadi korporasi pendidikan, di mana mahasiswa dipandang sebagai konsumen dan dosen dianggap sebagai pekerja akademik yang harus produktif menghasilkan profit institusi. Transformasi ini menjauhkan fungsi pendidikan dari tujuan awalnya sebagai sarana pembebasan dan pembangunan kesadaran kritis. Sebaliknya, pendidikan justru berpotensi menjadi instrumen reproduksi ketimpangan kelas dan memperkuat hegemoni **neoliberalisme** dalam kehidupan sosial

Kesehatan di Bawah Bayang Pasar: Menelusuri Rasionalitas Neoliberal dalam Kehidupan Modern

Nabila Isyana (FKEP)

Dalam kehidupan modern, **logika pasar** telah mendominasi hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk **kesehatan**. Prinsip **efisiensi, persaingan, dan profit** kini menembus bidang yang sebelumnya dijalankan berdasarkan nilai **etika dan solidaritas sosial**. Kesehatan tidak lagi semata-mata dipandang sebagai **hak dasar manusia**, melainkan sebagai sektor ekonomi yang tunduk pada **mekanisme pasar**. Pergeseran ini merupakan puncak evolusi **kapitalisme menuju neoliberalisme**, di mana pasar dijadikan poros utama kehidupan sosial dan alat ukur keberhasilan manusia.

Untuk memahami perubahan tersebut, penting meninjau kembali akar kapitalisme klasik yang berlandaskan pada kepemilikan pribadi dan kebebasan pasar. Dalam sistem ini, individu dianggap rasional dan kompetisi dipercaya dapat menciptakan kemakmuran. Namun, kapitalisme juga menimbulkan ketimpangan sosial dan menggeser nilai-nilai kemanusiaan. Dari sinilah neoliberalisme lahir sebagai bentuk baru kapitalisme yang bukan hanya sistem ekonomi, tetapi juga ideologi yang membentuk cara berpikir dan bertindak manusia. Negara pun perlahan bergeser dari pelindung masyarakat menjadi pelayan pasar.



Neoliberalisme memperluas **logika ekonomi** hingga ke seluruh dimensi kehidupan termasuk **layanan publik** seperti kesehatan. Negara tetap hadir, tetapi perannya terbatas untuk memastikan **kelancaran mekanisme pasar** melalui privatisasi dan deregulasi. Akibatnya, prinsip **keuntungan** dan **efisiensi** menggantikan semangat **solidaritas sosial**. Rumah sakit, apotek, dan industri farmasi kini beroperasi layaknya perusahaan yang berorientasi **laba**, bukan lembaga kemanusiaan. Kesehatan pun kehilangan makna universalnya sebagai **hak**, dan berubah menjadi **komoditas ekonomi**.

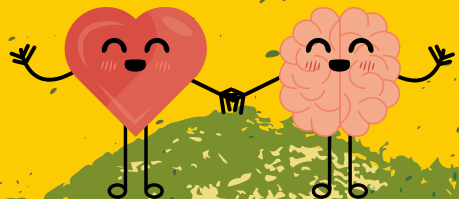


Dalam konteks pelayanan kesehatan, logika pasar ini memunculkan **ketimpangan yang tajam**. Rumah sakit menjadi bisnis kompetitif, pasien berubah menjadi **konsumen**, dan kualitas layanan bergantung pada kemampuan finansial. **Inovasi medis** pun lebih diarahkan pada penyakit yang menjanjikan keuntungan besar, bukan pada **kebutuhan masyarakat miskin**. Akibatnya, riset kesehatan menjadi berorientasi pasar dan mengabaikan prinsip **keadilan sosial**. Bahkan nilai-nilai etis profesi medis terkikis oleh tuntutan **profit**, menjadikan interaksi dokter-pasien bersifat **transaksional**.



Fenomena tersebut juga terjadi di **Indonesia**, di mana sistem kesehatan semakin dipengaruhi oleh prinsip neoliberal. **Privatisasi rumah sakit** dan kemitraan publik-swasta memperlihatkan pergeseran nilai dari **kesehatan sebagai hak sosial** menjadi komoditas ekonomi. Meskipun **BPJS Kesehatan** hadir sebagai upaya pemerataan akses, sistemnya masih tunduk pada tekanan pasar dan **keterbatasan pembiayaan**. Di sinilah muncul ketegangan antara dua nilai utama: efisiensi ekonomi versus **keadilan sosial** dalam pelayanan kesehatan.

Akhirnya, memahami kesehatan di era neoliberal bukan hanya soal **kebijakan**, tetapi juga persoalan moral dan nilai. Bila kesehatan terus diperlakukan sebagai **barang dagangan**, maka solidaritas dan **keadilan sosial** akan semakin terpinggirkan. Negara perlu mengambil kembali perannya sebagai penjamin kesejahteraan rakyat, bukan sekadar **fasilitator pasar**. Dengan menempatkan nilai kemanusiaan di atas **nilai ekonomi**, sistem kesehatan dapat kembali pada hakikatnya: **melayani manusia, bukan melayani pasar**.



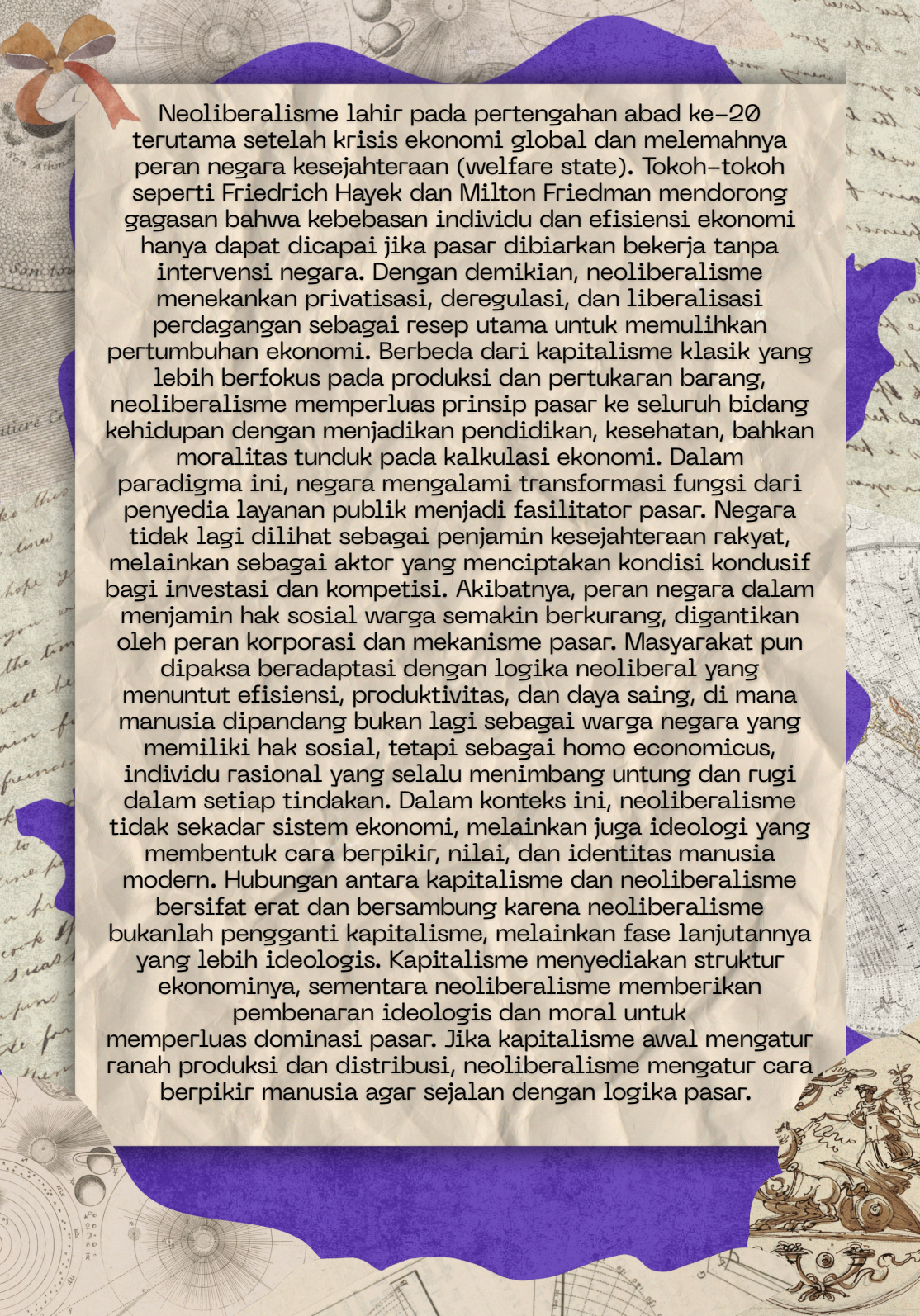


DARI KAPITALISME KE NEOLIBERALISME

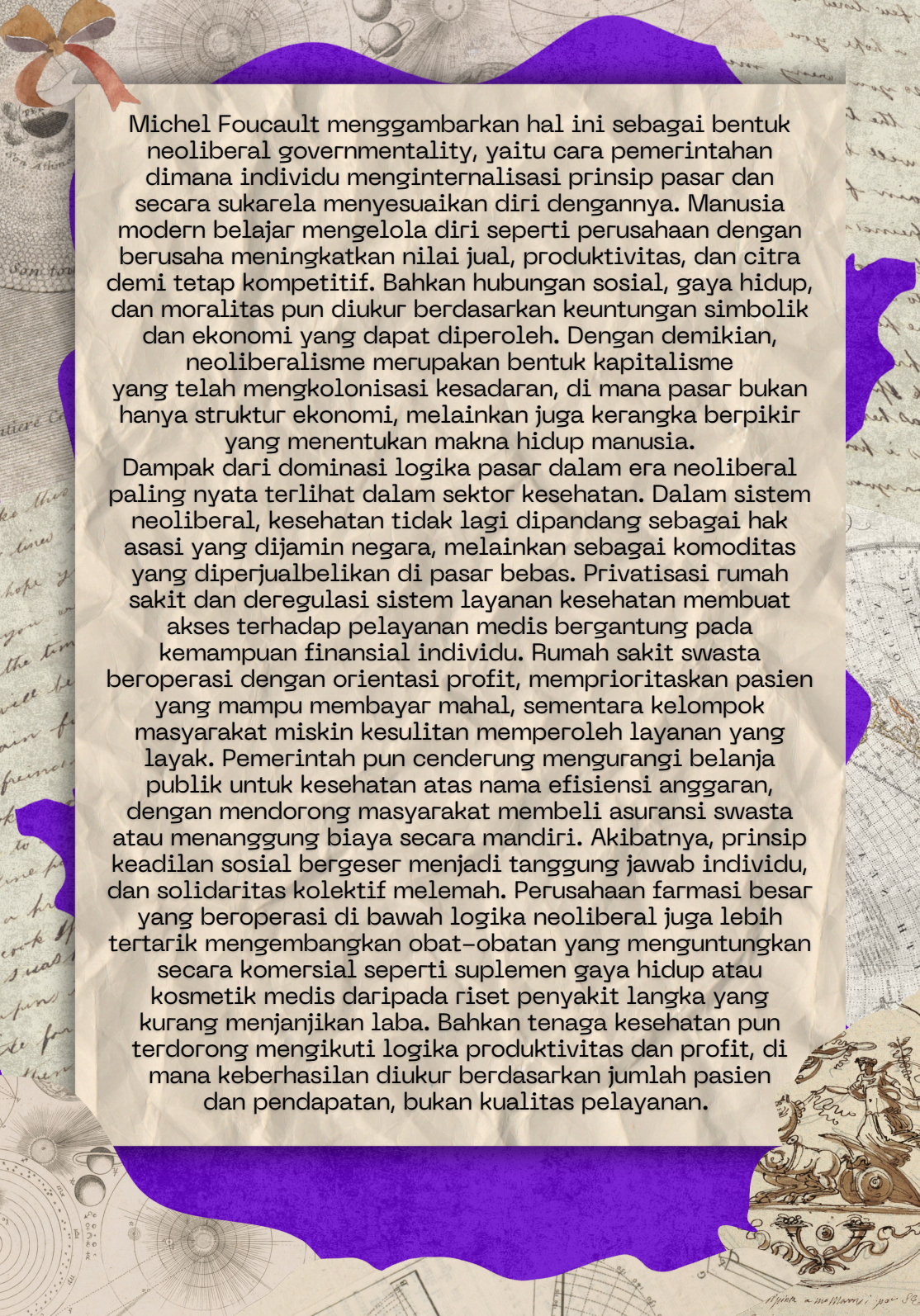


KETIKA PASAR MENGATUR ASPEK KEHIDUPAN - TSAQIFA N.S (FKM)

Dalam era modern yang ditandai oleh globalisasi dan kemajuan teknologi, kehidupan sosial manusia kian diatur oleh kekuatan pasar yang merembes ke segala bidang kehidupan. Segala sesuatu mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga kesehatan dihitung dan dinilai berdasarkan logika efisiensi, kompetisi, dan keuntungan. Fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil evolusi panjang sistem ekonomi kapitalis yang kemudian bertransformasi menjadi neoliberalisme. Kapitalisme pada dasarnya merupakan sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan orientasi pada pencapaian laba. **Adam Smith dalam *The Wealth of Nations* (1776)** memperkenalkan konsep "tangan tak terlihat" (invisible hand) yang menggambarkan bahwa ketika setiap individu mengejar keuntungan pribadi, maka secara tidak langsung akan terbentuk keseimbangan yang menguntungkan bagi masyarakat. Prinsip dasar kapitalisme terdiri atas kebebasan individu dalam berusaha, kepemilikan pribadi atas sumber daya, kompetisi bebas, dan akumulasi modal sebagai tujuan utama. Namun di balik kemajuan ekonomi yang dihasilkan, kapitalisme menyimpan kontradiksi mendasar berupa ketimpangan sosial yang tajam antara pemilik modal dan kelas pekerja. Karl Marx mengkritik sistem ini sebagai bentuk eksploitasi manusia atas manusia, di mana nilai lebih yang dihasilkan pekerja diambil oleh pemilik modal demi memperluas akumulasi kapital. Seiring berkembangnya waktu dan munculnya berbagai krisis ekonomi, sistem kapitalis mengalami pembaruan ideologis melalui neoliberalisme yang menawarkan wajah baru kapitalisme dengan menempatkan logika pasar tidak hanya sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai prinsip utama dalam mengatur kehidupan sosial.

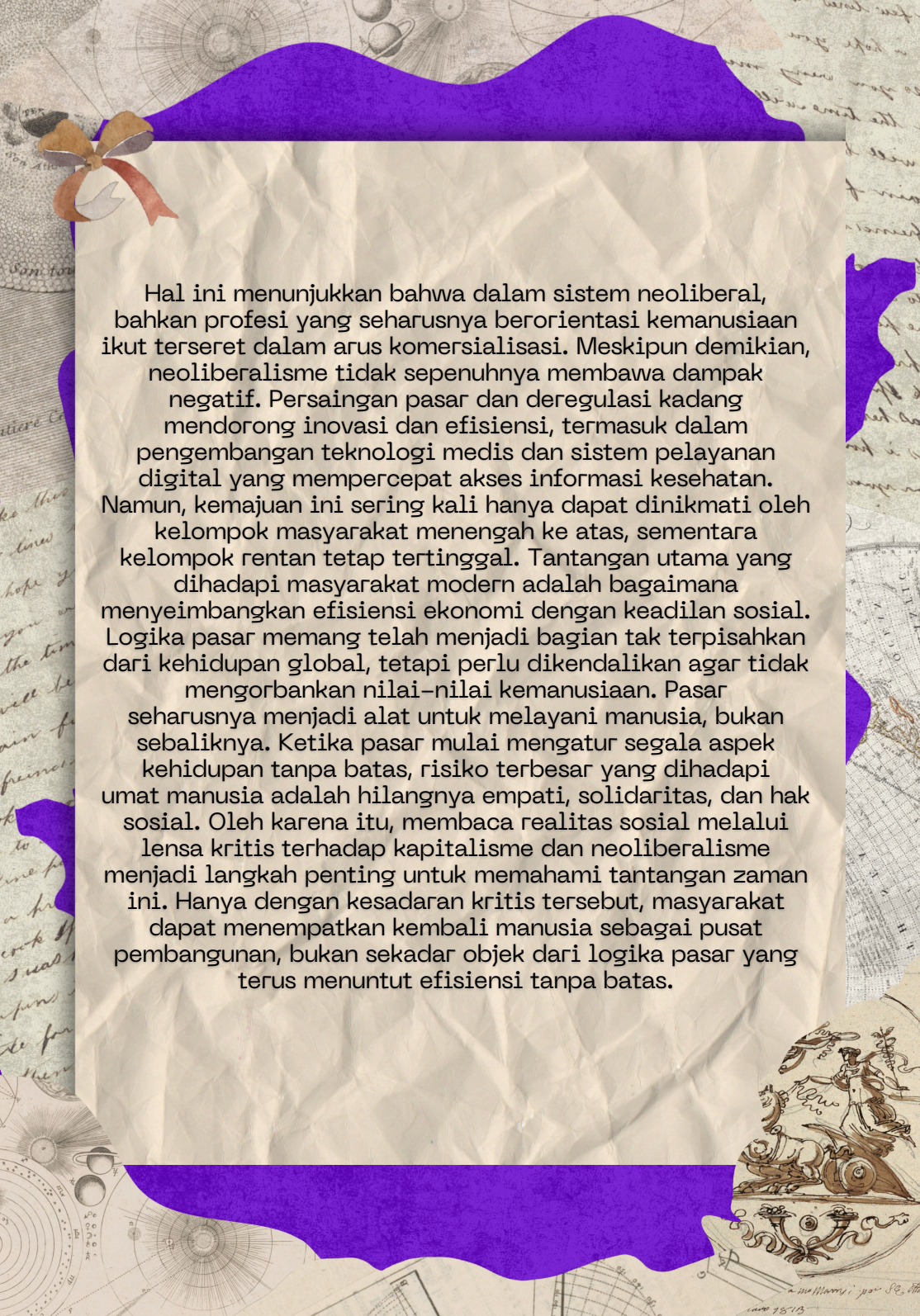


Neoliberalisme lahir pada pertengahan abad ke-20 terutama setelah krisis ekonomi global dan melemahnya peran negara kesejahteraan (welfare state). Tokoh-tokoh seperti Friedrich Hayek dan Milton Friedman mendorong gagasan bahwa kebebasan individu dan efisiensi ekonomi hanya dapat dicapai jika pasar dibiarkan bekerja tanpa intervensi negara. Dengan demikian, neoliberalisme menekankan privatisasi, deregulasi, dan liberalisasi perdagangan sebagai resep utama untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi. Berbeda dari kapitalisme klasik yang lebih berfokus pada produksi dan pertukaran barang, neoliberalisme memperluas prinsip pasar ke seluruh bidang kehidupan dengan menjadikan pendidikan, kesehatan, bahkan moralitas tunduk pada kalkulasi ekonomi. Dalam paradigma ini, negara mengalami transformasi fungsi dari penyedia layanan publik menjadi fasilitator pasar. Negara tidak lagi dilihat sebagai penjamin kesejahteraan rakyat, melainkan sebagai aktor yang menciptakan kondisi kondusif bagi investasi dan kompetisi. Akibatnya, peran negara dalam menjamin hak sosial warga semakin berkurang, digantikan oleh peran korporasi dan mekanisme pasar. Masyarakat pun dipaksa beradaptasi dengan logika neoliberal yang menuntut efisiensi, produktivitas, dan daya saing, di mana manusia dipandang bukan lagi sebagai warga negara yang memiliki hak sosial, tetapi sebagai homo economicus, individu rasional yang selalu menimbang untung dan rugi dalam setiap tindakan. Dalam konteks ini, neoliberalisme tidak sekadar sistem ekonomi, melainkan juga ideologi yang membentuk cara berpikir, nilai, dan identitas manusia modern. Hubungan antara kapitalisme dan neoliberalisme bersifat erat dan bersambung karena neoliberalisme bukanlah pengganti kapitalisme, melainkan fase lanjutannya yang lebih ideologis. Kapitalisme menyediakan struktur ekonominya, sementara neoliberalisme memberikan pembenaran ideologis dan moral untuk memperluas dominasi pasar. Jika kapitalisme awal mengatur ranah produksi dan distribusi, neoliberalisme mengatur cara berpikir manusia agar sejalan dengan logika pasar.




Michel Foucault menggambarkan hal ini sebagai bentuk neoliberal governmentality, yaitu cara pemerintahan dimana individu menginternalisasi prinsip pasar dan secara sukarela menyesuaikan diri dengannya. Manusia modern belajar mengelola diri seperti perusahaan dengan berusaha meningkatkan nilai jual, produktivitas, dan citra demi tetap kompetitif. Bahkan hubungan sosial, gaya hidup, dan moralitas pun diukur berdasarkan keuntungan simbolik dan ekonomi yang dapat diperoleh. Dengan demikian, neoliberalisme merupakan bentuk kapitalisme yang telah mengkolonisasi kesadaran, di mana pasar bukan hanya struktur ekonomi, melainkan juga kerangka berpikir yang menentukan makna hidup manusia.

Dampak dari dominasi logika pasar dalam era neoliberal paling nyata terlihat dalam sektor kesehatan. Dalam sistem neoliberal, kesehatan tidak lagi dipandang sebagai hak asasi yang dijamin negara, melainkan sebagai komoditas yang diperjualbelikan di pasar bebas. Privatisasi rumah sakit dan deregulasi sistem layanan kesehatan membuat akses terhadap pelayanan medis bergantung pada kemampuan finansial individu. Rumah sakit swasta beroperasi dengan orientasi profit, memprioritaskan pasien yang mampu membayar mahal, sementara kelompok masyarakat miskin kesulitan memperoleh layanan yang layak. Pemerintah pun cenderung mengurangi belanja publik untuk kesehatan atas nama efisiensi anggaran, dengan mendorong masyarakat membeli asuransi swasta atau menanggung biaya secara mandiri. Akibatnya, prinsip keadilan sosial bergeser menjadi tanggung jawab individu, dan solidaritas kolektif melemah. Perusahaan farmasi besar yang beroperasi di bawah logika neoliberal juga lebih tertarik mengembangkan obat-obatan yang menguntungkan secara komersial seperti suplemen gaya hidup atau kosmetik medis daripada riset penyakit langka yang kurang menjanjikan laba. Bahkan tenaga kesehatan pun terdorong mengikuti logika produktivitas dan profit, di mana keberhasilan diukur berdasarkan jumlah pasien dan pendapatan, bukan kualitas pelayanan.



Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem neoliberal, bahkan profesi yang seharusnya berorientasi kemanusiaan ikut terseret dalam arus komersialisasi. Meskipun demikian, neoliberalisme tidak sepenuhnya membawa dampak negatif. Persaingan pasar dan deregulasi kadang mendorong inovasi dan efisiensi, termasuk dalam pengembangan teknologi medis dan sistem pelayanan digital yang mempercepat akses informasi kesehatan. Namun, kemajuan ini sering kali hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas, sementara kelompok rentan tetap tertinggal. Tantangan utama yang dihadapi masyarakat modern adalah bagaimana menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial. Logika pasar memang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan global, tetapi perlu dikendalikan agar tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Pasar seharusnya menjadi alat untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Ketika pasar mulai mengatur segala aspek kehidupan tanpa batas, risiko terbesar yang dihadapi umat manusia adalah hilangnya empati, solidaritas, dan hak sosial. Oleh karena itu, membaca realitas sosial melalui lensa kritis terhadap kapitalisme dan neoliberalisme menjadi langkah penting untuk memahami tantangan zaman ini. Hanya dengan kesadaran kritis tersebut, masyarakat dapat menempatkan kembali manusia sebagai pusat pembangunan, bukan sekadar objek dari logika pasar yang terus menuntut efisiensi tanpa batas.

PASAR SEBAGAI HUKUM TERTINGGI? TELAAH KRITIS ATAS PERAN HUKUM DALAM KAPITALISME NEOLIBERAL



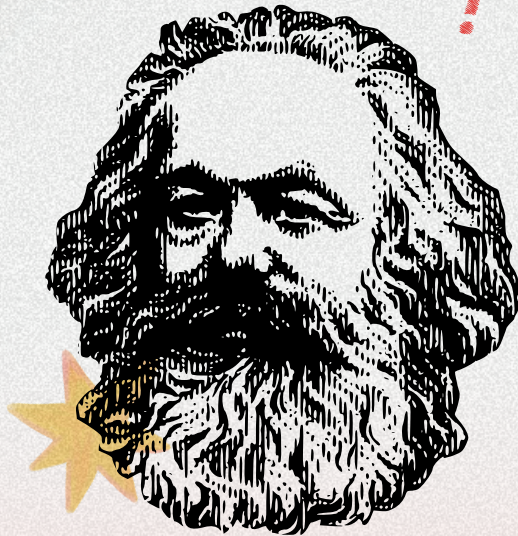
ANDI AHMAD RIZQITAUFHANI

FAKULTAS HUKUM



Dalam era kapitalisme neoliberal, pasar kerap diposisikan sebagai entitas otonom yang seolah memiliki hukum dan logikanya sendiri, mendikte arah kebijakan negara serta membatasi ruang gerak hukum positif. Prinsip “pasar bebas” dijunjung tinggi sebagai mekanisme paling efisien untuk mengatur kehidupan ekonomi, bahkan sosial dan politik. Namun, di balik retorika efisiensi dan kebebasan individu, tersimpan pertanyaan mendasar: apakah hukum masih berfungsi sebagai instrumen keadilan publik, ataukah telah direduksi menjadi sekadar pelayan kepentingan pasar? Telaah kritis terhadap relasi antara hukum dan kapitalisme neoliberal ini menjadi penting untuk memahami bagaimana kekuasaan ekonomi dapat mengonstruksi, menundukkan, bahkan menggantikan norma-norma hukum yang semestinya melindungi kepentingan kolektif.

Karl Marx mendefinisikan kapitalisme sebagai suatu sistem sosial-ekonomi yang memiliki empat ciri utama. Pertama, adanya produksi komoditi, yaitu kegiatan produksi yang ditujukan bukan untuk memenuhi kebutuhan langsung, melainkan untuk pertukaran di pasar. Kedua, kerja-upahan, di mana para buruh yang tidak memiliki alat produksi harus menjual tenaga kerjanya kepada pemilik modal demi memperoleh penghidupan. Ketiga, sistem ini ditandai oleh dorongan untuk menumpuk kekayaan tanpa batas tujuan utama kapitalis bukanlah konsumsi atau pemenuhan kebutuhan, melainkan memperbesar nilai kapital secara terus-menerus. Keempat, kapitalisme memiliki organisasi yang rasional, yaitu suatu tatanan produksi dan distribusi yang sistematis dan efisien, memungkinkan akumulasi modal serta ekspansi ekonomi dalam skala besar.



Bagi Marx, keempat ciri tersebut menunjukkan bahwa kapitalisme bukan sekadar aktivitas ekonomi individual, tetapi merupakan bentuk organisasi sosial yang historis dan spesifik, yang mengatur hubungan antara manusia, produksi, dan kekayaan dalam masyarakat.



NEOLIBELARISME

Sedangkan, dipahami sebagai suatu paham yang menempatkan kebebasan individu dan pasar bebas (free-market, laissez-faire) sebagai prinsip utama. Ide ini melihat campur tangan negara sebagai ancaman terhadap kebebasan ekonomi dan politik individu bahwa pemerintah seharusnya minimal atau bahkan seminimal mungkin mengintervensi aktivitas pasar dan ekonomi.

Lebih jauh, neoliberalisme dalam kerangka ini digambarkan sebagai gabungan liberalisme klasik (yang menekankan hak individu dan kepemilikan pribadi) dengan ekonomi neoklasik pasar bebas.

Doktrin seperti yang dirumuskan oleh Friedrich Hayek dan Milton Friedman, misalnya, mengatakan bahwa kebebasan ekonomi (kebebasan untuk bersaing, memiliki, berdagang) adalah landasan bagi kebebasan politik dan bahwa sistem pasar yang bebas adalah cara utama mencapai kemerdekaan tersebut.

Kapitalisme dan neoliberalisme memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena pada dasarnya neoliberalisme merupakan bentuk atau tahap baru dari kapitalisme yang muncul dalam konteks globalisasi ekonomi modern. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi atas alat produksi, kebebasan pasar, serta pencarian.

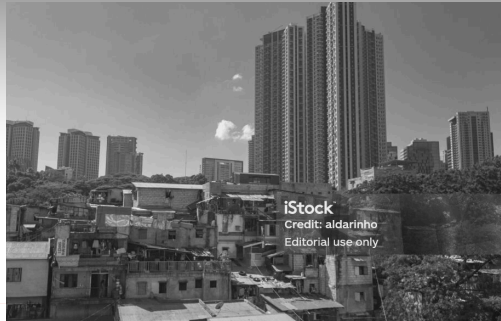
Sementara itu, neoliberalisme dapat dipahami sebagai ideologi atau kebijakan yang memperbarui prinsip-prinsip kapitalisme dengan menekankan liberalisasi ekonomi, privatisasi sektor publik, deregulasi, dan pengurangan peran negara dalam ekonomi.

Menurut David Harvey, neoliberalisme bukanlah pemutusan dari kapitalisme, melainkan proyek politik untuk memulihkan kekuasaan kelas kapitalis melalui pembentukan kembali kondisi bagi akumulasi modal.

Pierre Bourdieu juga menegaskan bahwa neoliberalisme merupakan bentuk ekspansi logika kapitalis ke seluruh bidang kehidupan sosial, termasuk pendidikan dan budaya, yang menjadikan manusia tunduk pada prinsip kompetisi dan efisiensi pasar.



Pandangan ini sejalan dengan Michel Foucault yang melihat neoliberalisme bukan hanya sebagai kebijakan ekonomi, tetapi sebagai rasionalitas pemerintahan baru dalam kapitalisme, di mana individu didorong untuk bertindak layaknya wirausahawan atas dirinya sendiri. Selain itu, Karl Polany telah lebih dahulu mengkritik kapitalisme pasar bebas yang menjadi dasar munculnya neoliberalisme, karena menimbulkan ketimpangan dan krisis sosial.

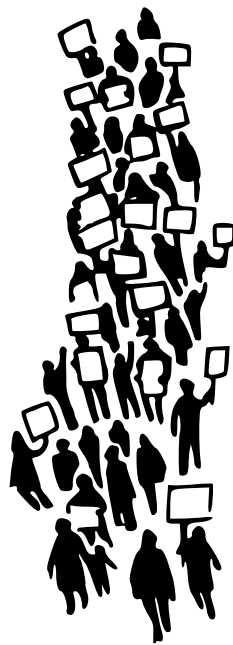


Naomi Klein menambahkan bahwa neoliberalisme merupakan strategi kapitalisme global untuk memperluas dominasi pasar melalui privatisasi dan deregulasi, sering kali memanfaatkan situasi krisis untuk mempercepat reformasi ekonomi.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa neoliberalisme **bukanlah** sistem yang berdiri sendiri, melainkan **fase mutakhir** dari kapitalisme yang memperkuat logika pasar bebas, individualisme ekstrem, dan dominasi modal dalam skala global.

GLOBAL GROWTH

AT ALL COST?



Dalam sistem kapitalisme neoliberalisme, hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga dan melegitimasi kekuasaan modal. Neoliberalisme menempatkan pasar sebagai pengatur utama kehidupan sosial dan ekonomi, sehingga negara tidak lagi berfungsi melindungi kepentingan publik, melainkan menjaga agar mekanisme pasar dapat berjalan tanpa hambatan. Dalam kerangka ini, hukum tidak lagi netral, tetapi menjadi alat yang memastikan kepastian dan keamanan bagi investasi serta ekspansi modal.

Undang-undang tentang investasi, pertambangan, dan agraria, misalnya, sering disusun untuk mempermudah para kapitalis menguasai sumber daya alam dan ruang hidup masyarakat, sementara pasal-pasal perlindungan sosial dan lingkungan dilemahkan atas nama “efisiensi” atau “kepastian hukum bagi investor”.



Akibatnya, hukum berubah menjadi instrumen legitimasi bagi praktik kapital ekstraktif. Negara menggunakan perangkat hukum seperti izin tambang, hak guna usaha, dan regulasi pembangunan untuk memberikan legalitas pada eksploitasi sumber daya. Ketika masyarakat menolak atau menuntut keadilan, hukum pidana dan aparat keamanan digunakan untuk menertibkan mereka demi stabilitas investasi. Dalam situasi ini, hukum tidak berfungsi melindungi rakyat, tetapi justru melanggengkan relasi kuasa antara pemodal, negara, dan masyarakat. Singkatnya hukum dan moralitas publik dijadikan semacam ritual penyucian bagi ideologi pasar.


Dengan demikian, hubungan antara kapitalisme neoliberalisme dan hukum bersifat struktural sekaligus ideologis. Secara struktural, hukum mengatur aliran modal dan tenaga kerja agar sesuai dengan logika akumulasi kapital; secara ideologis, hukum berfungsi membungkus ketimpangan dan perampasan dalam bahasa keadilan, pembangunan, dan kemajuan.

Neoliberalisme tidak hanya menguasai ekonomi, tetapi juga mengkolonisasi hukum dan nilai-nilai sosial agar masyarakat menerima ketimpangan sebagai hal yang wajar. Hukum dalam konteks ini bukan lagi alat emansipasi, melainkan perangkat kekuasaan yang meneguhkan dominasi kapital atas kehidupan sosial, ekonomi, dan bahkan moral masyarakat.





Kapitalisme neoliberal bukan hadir sebagai monster tunggal yang mudah dikenali, ia menyelip lewat bahasa efisiensi, rasionalitas pasar, dan janji kemajuan. Dari sektor kesehatan hingga pendidikan, dari ketenagakerjaan sampai pengelolaan sumber daya alam, logika pasar bekerja seperti kaca mata yang memaksa kita melihat realitas sosial sebagai rangkaian transaksi, bukan relasi kemanusiaan.



Ketika segala sesuatu dinilai berdasarkan nilai tukar, bukan nilai guna atau nilai sosial, masyarakat perlahan dibentuk menjadi kumpulan individu kompetitif yang diharapkan terus memproduksi, beradaptasi, dan patuh pada ritme ekonomi. Kritik sosial bukan sekadar amarah terhadap sistem, tetapi usaha kolektif untuk membayangkan bentuk kehidupan yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih berpihak pada kesejahteraan bersama.

